

ABSTRAK

Pemberian nomor pada akta Notaris merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan sesuai Pasal 38 ayat (2) UUJN nomor pada akta Notaris merupakan bagian dari awal akta atau kepala akta dan berkaitan dengan administrasi seorang Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat mengalami kesalahan dalam membuat akta. Kesalahan tersebut salah satunya dapat berupa salah dalam memberikan nomor pada akta.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam terbitnya penomoran ganda pada akta yang dibuat dan bagaimana pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah dalam terbitnya penomoran ganda pada akta yang dibuat Notaris. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris dalam terbitnya penomoran ganda pada akta yang dibuat dan pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah dalam terbitnya penomoran ganda pada akta yang dibuat Notaris.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer berupa wawancara dengan narasumber dan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan teori-teori hukum yang dalam penelitian ini yakni teori tanggung jawab dan teori pengawasan.

Hasil dari penelitian ini ialah pertanggungjawaban Notaris dalam penomoran ganda pada akta yang dibuat adalah membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik dengan membuat akta berita acara pembetulan dihadapan para pihak, saksi dan Notaris. Penomoran ganda pada akta dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi yang tidak menyebabkan kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jika dihubungkan dengan teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan jika ada pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata tentang kerugian maka Notaris dapat dimintakan tanggung jawab terhadap pihak yang menderita kerugian baik itu kerugian formil ataupun kerugian materiil jika Notaris terbukti bersalah di Pengadilan. serta pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah dalam terbitnya penomoran ganda pada akta yang dibuat Notaris adalah pengecekan buku protokol dan membuat berita acara pemeriksaan, pembinaan kepada Notaris terkait tanggungjawab Notaris terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan serta meneruskan berita acara pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat terkait penjatuhan sanksi sesuai UUJN dan Kode Etik Notaris.

Saran yang dapat diberikan yakni pemerintah diharapkan dapat memperbaharui Undang-Undang Terkait Notaris sesuai dengan keadaan dan perkembangan saat ini, Majelis Pengawas Daerah diharapkan berperan lebih aktif dalam melakukan perannya terutama peran pembinaannya serta Notaris diharapkan lebih teliti dalam melaksanakan Jabatannya sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Kata Kunci : MPD, Notaris, Penomoran Ganda, Pengawasan, Pembinaan.

ABSTRACT

Numbering a Notarial deed is a crucial thing. This is related to Article 38 paragraph (2) of the UUJN, the number on a Notarial deed is part of the beginning of the deed or the head of the deed and is related to the administration of a Notary. In carrying out his/her duties, a Notary may make mistakes in making a deed. One of these mistakes can be in the form of giving the wrong number to the deed.

The problem that will be raised in this study is how the Notary is responsible for issuing double numbering on the deeds made and how the Regional Supervisory Board supervises and guides the issuance of double numbering on the deeds made by the Notary. The purpose of this study is to determine and analyze the Notary's responsibility in issuing double numbering on the deeds made and the supervision and guidance of the Regional Supervisory Board in issuing double numbering on the deeds made by the Notary.

The research method used by the researcher is empirical juridical, with research specifications in analytical descriptive. The data sources in this study are primary data in the form of interviews with informants and secondary data sources consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, journals and legal theories which in this study are the theory of responsibility and the theory of supervision.

The results of this study are that the Notary's responsibility in double numbering on the deeds made is to correct writing errors and/or typos by making a deed of correction minutes in front of the parties, witnesses and Notary. Double numbering on the deed is categorized as an administrative violation that does not cause evidentiary power as a private deed. If it is connected with the theory of responsibility based on error if there is a party that is harmed in accordance with Article 1365 of the Civil Code concerning losses, the Notary can be held responsible for the party that suffers losses, both formal losses and material losses if the Notary is proven guilty in Court. as well as supervision and guidance of the Regional Supervisory Board in the issuance of double numbering on deeds made by Notaries is checking the protocol book and making minutes of examination, guidance to Notaries regarding the Notary's responsibility for administrative violations committed and forwarding the minutes of examination to the Regional Supervisory Board and the Central Supervisory Board regarding the imposition of sanctions in accordance with the UUJN and the Notary Code of Ethics.

Suggestions that can be given are that the government is expected to be able to renew the Law Regarding Notaries in accordance with current conditions and developments, the Regional Supervisory Board is expected to play a more active role in carrying out its role, especially its coaching role, and Notaries are expected to be more careful in carrying out their Position in accordance with the UUJN and the Notary Code of Ethics.

Keywords : MPD, Notary, Double Numbering, Supervision, Coaching.